



Habitus Membentur Field yang Berubah: Sikap Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap Relokasi dalam Kerangka Bourdieu

Ridwan Wicaksono¹

¹Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 02/07/2025

Direvisi 12/10/2025

Diterima 19/10/2025

Dipublikasikan 01/11/2025

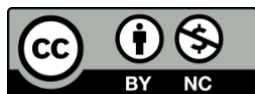
Kata kunci:

Relokasi
Pedagang Kaki Lima
Malioboro
Habitus
Medan

Keywords:

Relocation
Street Vendors
Malioboro
Habitus
Field

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Abstrak

Penelitian ini berangkat dari teka-teki sosiologis mengenai respons terbelah pedagang kaki lima Malioboro terhadap kebijakan relokasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Pierre Bourdieu, penelitian ini menganalisis benturan antara *habitus* kolektif pedagang dengan perubahan *field* spasial yang dipaksakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sikap ini berakar pada tingkat *hysteresis* atau ketidaksesuaian antara kebiasaan lama dan kondisi baru, yang dialami secara tidak setara. Kelompok Tri Dharma mengalami *hysteresis* parah akibat kondisi relokasi yang tidak stabil sehingga memicu resistensi, sementara kelompok Pemalni menunjukkan adaptasi lebih baik di lokasi yang permanen. Penelitian ini menegaskan bahwa relokasi adalah peristiwa sosial-politik yang kompleks, dan menggarisbawahi pentingnya kebijakan tata ruang untuk mempertimbangkan *habitus* komunitas terdampak demi mencegah terciptanya ketimpangan baru.

Abstract

This study begins with a sociological puzzle regarding the divided responses of street vendors in Malioboro toward the relocation policy. Employing a qualitative approach and Pierre Bourdieu's theoretical framework, it analyzes the clash between the vendors' collective habitus and the enforced changes in spatial fields. The findings indicate that these differing attitudes are rooted in varying levels of hysteresis, or misalignment between long-standing practices and new conditions, experienced unequally among the groups. The Tri Dharma group suffers severe hysteresis due to unstable relocation conditions, leading to resistance, while the Pemalni group shows better adaptation in a more permanent location. This research asserts that relocation is a complex socio-political event and highlights the importance of spatial policies that consider the habitus of affected communities to prevent the emergence of new inequalities.

Penulis Korespondensi

Ridwan Wicaksono

Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jalan Grafika No.2, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55284

Email: ridwan.w@mail.ugm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Malioboro merupakan simbol penting budaya dan ekonomi Yogyakarta Kawasan ini dikenal sebagai ruang dimana tradisi lokal berpadu dengan dinamika kehidupan kota. Sejak 1970-an, ribuan pedagang kaki lima (PKL) telah mengisi sepanjang jalannya (Wibisono, 2001). Kehadiran mereka bukan hanya menjadi daya tarik wisata belanja, tetapi juga membangkitkan *the vibrancy and liveliness* yang khas dari kawasan (Wibisono 2001). Penggunaan arkade pejalan kaki untuk berdagang menandakan adanya mekanisme informal berbasis budaya yang mengakomodasi berbagai kepentingan melalui nilai *guyub* atau sikap saling memberi dan menerima (Purwanto, 2007; Purwanto et al., 2012). Ruang Malioboro juga dipahami sebagai hasil proses sejarah yang terbentuk dari interaksi para penggunanya, saat berbagai aktor ruang saling berhubungan dan menciptakan ruang bersama yang unik (Millatina, 2017). Bahkan kondisi Malioboro yang kerap dianggap *semrawut* pernah dinilai sebagai bagian esensial dari keaslian Kawasan dan menghasilkan pengalaman ruang yang istimewa bagi para pengunjung maupun pedagang (Nur, 2015).

Perubahan lanskap sosial dan spasial mulai mencolok sejak kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada Februari 2022. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta mendasari kebijakan ini dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki (Garjito, 2023), memberikan kepastian hukum bagi para pedagang (tempo.co, 2022), serta mendukung pengajuan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO (Alfriyanto, 2023). Sekitar 1.800 pedagang yang semula menempati koridor pejalan kaki dan arkade pertokoan dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Sejak Januari 2025, pedagang di Teras Malioboro 2 kembali direlokasi ke Beskalan dan Ketandan. Dampak awal yang dilaporkan ialah penurunan rata-rata pendapatan harian hingga 60,48%, dan merosotnya jumlah pembeli (Sari, 2022), yang mengindikasikan pengaruh perubahan lokasi terhadap kinerja ekonomi pedagang secara keseluruhan (Sari, 2022).

Respons pedagang terhadap relokasi tidak seragam. Pedagang Tri Dharma, terutama yang ditempatkan di Teras Malioboro 2, aktif melakukan konsolidasi, audiensi, pengajuan petisi (Harianjogja.com, 2024), hingga aksi demonstrasi (Detik.com, 2024). Isu yang disuarakan meliputi penurunan pendapatan, ketidakcukupan sarana-prasarana, serta rencana relokasi lanjutan. Mereka bahkan terlibat konflik terbuka dengan pihak berwenang dan menyampaikan keluhan mereka ke berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM (Kompas.id, 2024). Sebaliknya, pedagang Pemalni yang mendominasi di Teras Malioboro 1 terlihat lebih mapan dan tidak bergabung dalam gerakan protes Tri Dharma, meskipun dampak ekonomi dari relokasi pada dasarnya sama buruknya bagi kedua kelompok (Sari, 2022).

Sikap ini menantang asumsi rasionalis kesamaan nasib akan melahirkan solidaritas. Dalam kerangka pilihan rasional Olson, partisipasi tindakan kolektif terjadi jika ada insentif yang hanya dinikmati anggota yang aktif (Congleton, 2015). Tanpa insentif tersebut, individu rasional cenderung menjadi penunggang bebas (*free rider*) dan enggan berpartisipasi (Congleton, 2015). Namun, fenomena di Malioboro tidak sebatas persoalan partisipasi atau *free riding*. Fragmentasi yang muncul memperlihatkan bahwa pola pikir untung-rugi semata tidak memadai untuk menjelaskannya, terutama ketika Sebagian kelompok memilih diam sementara kelompok lain memobilisasi protes secara militan.

Keterbatasan tersebut mendorong pencarian kerangka teoretis lain. Salah satu pendekatan yang sering dijadikan rujukan adalah teori strukturasi Giddens, yang menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, individu sebagai agen berpengetahuan secara reflektif memanfaatkan perubahan aturan dan sumber daya (struktur) untuk menavigasi keadaan (Heidemann, 2018). Meski demikian, pendekatan ini kurang menjawab asal-usul tindakan yang berbeda, mengapa satu kelompok memilih protes sementara kelompok lain lebih menerima. Kerangka Pierre Bourdieu menawarkan penjelasan lebih memadai melalui konsep *habitus* dan *field*. Tindakan individu dipandu oleh *habitus* yakni naluri atau kebiasaan yang dibentuk pengalaman sejarah, dalam konteks *field* atau arena sosial (Atkinson, 2021; Bourdieu, 2018). Dalam perspektif ini, ruang kota tidak netral, melainkan perwujudan fisik dari ruang sosial dan kekuasaan simbolik (Grenfell, 2014). Koridor Malioboro berfungsi sebagai arena pertarungan tempat modal dan status sosial yang tidak setara didistribusikan dan perubahan dalam ruang fisik, seperti kebijakan relokasi, berpotensi memicu pergulatan simbolik untuk mendefinisikan ulang makna dan nilai sebuah tempat.

Pada konteks relokasi, benturan antara ruang sosial yang lama dan baru menjadi krusial. *Habitus* yang mapan mungkin tidak lagi selaras dengan kondisi *field* yang berubah. Ketidaksesuaian inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai *hysteresis* (Grenfell, 2014). Fenomena *hysteresis* diduga menjadi kunci untuk respons para pedagang tidak seragam, karena tingkat dan pengalaman ketidaksesuaian yang mereka rasakan kemungkinan besar berbeda. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perbedaan *habitus* antara pedagang Pemalni dan Tri Dharma memicu tingkat *hysteresis* yang berbeda dalam merespons perubahan *field* di Malioboro.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro. Alur penalaran bersifat induktif, yaitu pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Penelitian berangkat dari pengumpulan data serta pengamatan spesifik di lapangan, terutama pengalaman subjektif para pedagang yang kemudian mengidentifikasi pola yang muncul dan membangun pemahaman teoretis yang lebih umum. Landasan filosofisnya adalah fenomenologi, yang memandang dunia sosial tidak terpisah dari kesadaran manusia (Relph, 1970), sehingga menuntut peneliti untuk terlibat secara langsung dan reflektif dalam menggali makna.

Lokasi penelitian berada di Teras Malioboro sebagai kebijakan relokasi pedagang. Kawasan ini mencakup dua lokasi utama. Teras Malioboro 1 berstatus permanen sejak relokasi 2022 dan terletak di depan Pasar Beringharjo. Teras Malioboro 2 sebelumnya berada di sisi Gedung DPRD DIY, bersifat semi permanen, dan pada saat penulisan ini telah dibongkar untuk pembangunan Jogja Planning Gallery. Para pedagang dari Teras Malioboro 2 telah dipindahkan ke Teras Malioboro Beskalan yang merupakan perluasan dari Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro Ketandan yang berlokasi di belakang Ramayana Mall.

Subjek penelitian adalah pedagang kaki lima yang menjadi anggota dua paguyuban utama, yakni Pemalni dan Tri Dharma. Kedua kelompok ini dipilih karena posisinya sentral dalam konflik serta pengaruhnya terhadap dinamika relokasi Malioboro. Terdapat adanya

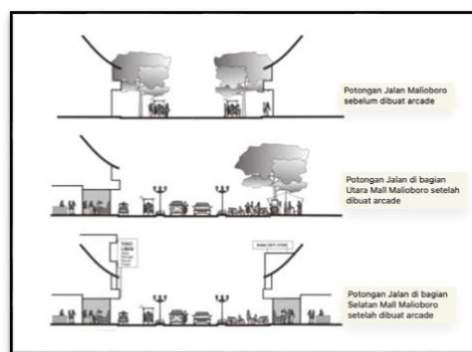
perbedaan riwayat posisi berdagang, di mana pedagang Pemalni sebelumnya berjualan menempel pada toko, sedangkan Tri Dharma tidak. Pasca relokasi, pedagang kelompok Pemalni menempati Teras Malioboro 1, sedangkan pedagang Tri Dharma ditempatkan di Teras Malioboro 2. Adapun pedagang asongan dan pedagang di sirip-sirip jalan sekitar Malioboro tidak dilibatkan karena tidak mengalami dampak langsung dari kebijakan relokasi yang menjadi fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disajikan ke dalam empat subbagian yang saling terkait untuk membangun alur argument dari kondisi awal hingga dampak akhir dari kebijakan relokasi. Pertama, pemaparan kondisi *field* Malioboro pra-relokasi sebagai landasan historis tempat *habitus* pedagang. Kedua, menguraikan pergeseran kekuasaan yang mengubah *field* tersebut secara fundamental. Ketiga, menganalisis benturan antara *habitus* lama dan *field* baru yang memunculkan fenomena *hysteresis* dan menyebabkan respons yang terbelah di antara kedua kelompok pedagang. Keempat, pembahasan pertarungan simbolik yang pada akhirnya mengubah tatanan sosial di antara para pedagang, di mana sebagian menerima dan sebagian lainnya masih resisten.

3.1. *Field* Malioboro Pra-Relokasi: Politik Populis dan Akomodasi Pedagang

Sebelum kebijakan relokasi 2022, *field* Malioboro dibentuk oleh interaksi dinamis antara politik populis Keraton Yogyakarta dan praktik adaptif pedagang kaki lima. Momen formatif terjadi pada 1970-an ketika Sri Sultan HB IX membangun arkade pejalan kaki selebar sekitar tiga meter oleh Sri Sultan HB IX pada era 1970-an (Purwanto, 2007; Purwanto et al., 2012; Wibisono, 2001). Arkade yang dibangun di atas lahan yang diambil dari properti toko menciptakan sebuah arena pertarungan antara kepentingan formal toko dan aktivitas informal, sekaligus mempertemukan domain publik dan privat (Wibisono, 2001). Meskipun pada awalnya arkade tersebut dimaksudkan untuk berbagi ruang antara pejalan kaki dan pedagang, pada praktiknya aktivitas pedagang kaki lima justru mendominasi area tersebut.



Gambar 1. Potongan Jalan Malioboro Sebelum dan Sesudah Pembangunan Jalur Pejalan Kaki Tahun 1970-an
Sumber: (Purwanto, 2007)

Pada periode itu, pemerintah bukan hanya membiarkan keberadaan pedagang, melainkan juga mengakomodasi mereka melalui insentif yang mendorong pertumbuhan cepat. Legitimasi muncul melalui penarikan retribusi serta regulasi, misalnya Perda Kota Yogyakarta No. 26/2002 yang memberi dasar hukum bagi izin berdagang dan kartu identitas. Persyaratan administratif menuntut persetujuan pemilik toko, menandakan adanya kesepakatan informal. Fakta bahwa banyak pedagang memegang surat persetujuan dan bertahan selama puluhan tahun melemahkan klaim adanya konflik luas antara pedagang dan pemilik toko. Secara logis, tanpa izin atau relasi baik, penertiban sudah lama dilakukan dan dokumen izin tidak akan diberikan. Kondisi koridor sebelum relokasi memperlihatkan dominasi aktivitas perdagangan di ruang pejalan kaki, sedangkan pascarelokasi koridor tampak lebih lapang dan teratur.



Gambar 2. Koridor Pedestrian Sebelum Relokasi
Sumber: (antaranews.com, 2018)



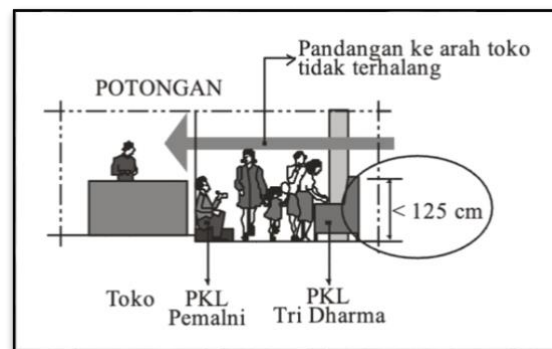
Gambar 3. Koridor Pedestrian Setelah Relokasi
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

Menurut perspektif Bourdieu, *field* adalah arena sosial terstruktur tempat para agen bersaing untuk memperebutkan modal dengan menggunakan aturan main tertentu (Ancelovici, 2021; Grenfell, 2014). Di sisi lain, *habitus* adalah sistem disposisi atau kecenderungan yang mendarah daging dalam diri agen, yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dan secara aktif membentuk praktik di masa kini dan masa depan (Robbins, 2020). Praktik sosial, lahir dari pertemuan antara *habitus* yang dimiliki individu dengan logika dan tuntutan dari sebuah *field*. *Habitus* inilah yang memberikan agen semacam naluri (*feel for the game*), yang memungkinkan mereka bertindak secara praktis tanpa kalkulasi sadar namun tetap sesuai dengan posisi dan sejarah mereka (Grenfell, 2014).

Di dalam *field* lama ini terbentuk sebuah *habitus* kolektif para pedagang, yaitu serangkaian praktik dan kebiasaan yang mendarah daging sebagai respons adaptif terhadap

kondisi tersebut. *Habitus* ini terwujud dalam berbagai praktik, seperti pola berdagang linear yang memastikan semua pedagang mendapatkan visibilitas yang merata, kebiasaan membongkar pasang lapak sesuai batasan, serta pemanfaatan jejaring sosial untuk penitipan barang di toko atau gudang bersama. Selain itu, ia juga mencakup sistem sosial komunal, seperti memiliki warung langganan untuk makan siang. Semua praktik ini secara keseluruhan menciptakan kohesi sosial dan cara hidup bersama yang menjadi dasar keberlangsungan mereka di Malioboro.

Interaksi yang harmonis antara *habitus* kolektif pedagang dan *field* dapat berlangsung selama puluhan tahun karena secara aktif ditopang dan dilegitimasi oleh sikap pemerintah yang populis pada era tersebut. Kebijakan pemerintah yang akomodatif, seperti melegalkan keberadaan pedagang melalui penarikan retribusi dan penerbitan izin, menciptakan sebuah *field* yang 'terbaca' dan dapat diprediksi oleh para pedagang. Kondisi yang stabil ini memungkinkan *habitus* adaptif para pedagang untuk terus berjalan dan direproduksi tanpa guncangan berarti. Hubungan yang saling menopang antara praktik pedagang dan kebijakan pemerintah inilah yang membentuk tatanan sosial khas Malioboro sebelum akhirnya diubah secara fundamental oleh kebijakan relokasi.



Gambar 4. Posisi Toko, PKL Pemalni, PKL Tri Dharma di Sisi Barat Jalan Malioboro
Sumber: (Purwanto et al., 2012)

Kestabilan *field* turut memicu proliferasi pedagang selama beberapa dekade. Seiring pertumbuhan, muncul pengorganisasian ke dalam paguyuban. Dua kelompok dominan adalah Tri Dharma dan Pemalni. Perbedaan spasialnya mendasar yaitu Tri Dharma menempati area terpisah dari pertokoan, sedangkan Pemalni menempel pada bangunan toko.

3.2. Pergeseran *Field* Politik: Sumbu Filosofi dan Relokasi Pedagang

Masyarakat terdiri atas berbagai *field* yang relatif otonom, seperti *field* politik dan ekonomi, yang masing-masing memiliki logika dan aturan sendiri (Bourdieu, 2018). *Field* politik sering memiliki kapasitas untuk memaksakan logikanya ke *field* lain, sebagaimana terlihat dalam kasus relokasi ini. Penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud *field* bukanlah ruang fisik, melainkan ruang relasi sosial yang bersifat abstrak tempat terjadinya persaingan. Meski demikian, *field* abstrak ini tetap terhubung erat dengan ruang fisik, sebab Bourdieu (2018) menegaskan bahwa ruang fisik tidak bersifat netral, melainkan menjadi wujud nyata dari ruang sosial dan kekuatan simbolik yang mengisinya. Oleh karena itu, sub-bab ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam *field* politik,

melalui agenda Sumbu Filosofi, memengaruhi ruang fisik Malioboro dan pada akhirnya mengubah secara drastis *field* para pedagang.

Pergeseran signifikan terjadi pada masa Sri Sultan HB X, ketika agenda Sumbu Filosofi menjadi pendorong utama relokasi. Agenda ini yang tidak dikembangkan pada masa HB IX Dimana mengubah relasi negara dengan pedagang dari akomodatif menjadi berjarak. Pergeseran dimulai dengan pembongkaran landasan hukum yang sebelumnya memberi ruang berdagang di koridor pejalan kaki. Perda No. 26/2002 dicabut dan diganti Perwali No. 37/2010: pengaturan tetap akomodatif (zona dagang, teknis lapak, perizinan di kecamatan, masa berlaku dua tahun), namun mengawali pengelolaan ruang yang lebih ketat.

"Dulu Sri Sultan HB IX pernah berpesan, pedagang kaki lima itu 'wargaku, rakyatku', biarkan mereka mencari makan di Malioboro. Sekarang kami malah dipindah. Masalahnya, pesan Ngarsa Dalem yang ke-IX itu tidak ada hitam di atas putih, jadi kami sekarang kalah dan tidak bisa merujuknya." (Wawancara Bu Y, PKL Teras Malioboro 1, Januari 2025)

Para pedagang, yang terbiasa dengan hubungan yang erat dan akomodatif pada era sebelumnya, kini dihadapkan pada interpretasi baru atas ruang Malioboro yang lebih menekankan aspek fisik dan simbolik kebudayaan Keraton. Akibatnya, praktik lama mereka, yang menganggap keberadaan pedagang sebagai bagian integral dari Malioboro, mulai terkikis oleh narasi baru yang diusung pemerintah. Guncangan ini dilegitimasi melalui instrumen hukum kunci, yaitu Perwali Kota Yogyakarta No. 13/2022 yang secara eksplisit mencabut ketentuan Perwali sebelumnya (No. 37/2010) dan menghapus dasar hukum bagi pedagang untuk berjualan di koridor utama. Surat Edaran Gubernur DIY No. 3/SE/I/2022, terbit beberapa hari sebelum relokasi, menegaskan perubahan *field* secara tiba-tiba. Indikasi awal sesungguhnya telah muncul dari konsep *ungkur-ungkuran* hasil sayembara penataan 2014 (jogjapolitan.harianjogja.com, 2019). Meskipun tidak diimplementasikan, usulan penataan ulang yang membuat pedagang saling membelakangi memicu perselisihan antara Pemalni dan Tri Dharma yang menandai guncangan ekspektasi spasial sejak tahap perencanaan.

Relokasi besar-besaran pada 2022 mempertegas pergeseran *field*. Sosialisasi dilakukan November 2021 dan efektif 1 Februari 2022, menciptakan tekanan waktu tinggi. Sejumlah pedagang melaporkan intimidasi, pemaksaan tanda tangan kontrak sewa, dan undian lapak yang dinilai tidak transparan. Relasi pemerintah dan pedagang serta antarpedagang menguat ke arah berjarak dan penuh ketidakpercayaan. Perubahan dipermanenkan melalui Perwali No. 49/2024 yang mewajibkan PKL pindah ke Teras Malioboro dan melarang aktivitas di koridor utama demi revitalisasi Sumbu Filosofi.

Implikasi ekonomi dan simbolik pun terasa. Pemerintah berargumen bahwa aktivitas komersial PKL menutupi dimensi kebudayaan kawasan. Namun observasi lapangan menunjukkan dominasi ekonomi bergeser ke bisnis skala besar seperti toko, kafe, restoran di ruang yang diklaim untuk kebudayaan. Toko-toko di koridor utama bahkan menjual komoditas serupa PKL (misalnya bakpia) dengan mutu dan harga bersaing, mengaburkan segmentasi pasar dan menambah tekanan pada pedagang yang dipindahkan ke Teras.

"Konsep Sumbu Filosofi sebenarnya tidak masalah, namun penataannya terlalu terburu-buru dan hanya mementingkan tampilan fisik semata. Pedagang merasa kesulitan secara ekonomi. Jika dulu pedagang kaki lima dituding mendominasi ekonomi Malioboro, kini dominasi itu hanya bergeser ke toko dan kafe. Ironisnya, segmentasi pasar yang dulu berbeda, bahwa pedagang melayani kualitas menengah ke bawah, dan toko menengah ke atas, sekarang menjadi kabur karena toko juga menjual barang yang sama. Ini merugikan kami, pedagang." (*Interview Bu M, PKL Teras Malioboro 1, Januari 2025*)



Gambar 5. Toko Bakpia di Jalan Utama Malioboro
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar 6. Toko Bakpia di Lantai 3 Teras Malioboro 1
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

3.3. *Habitus Hysteresis*: Perbedaan Pandangan Pemalni dan Tri Dharma

Sikap yang terbelah antara kelompok pedagang Pemalni dan Tri Dharma utamanya dipicu oleh perbedaan fundamental pada kondisi *field* baru pasca-relokasi, khususnya antara Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1, yang berlokasi di bekas Bioskop Indra di depan Pasar Beringharjo, merupakan sebuah bangunan permanen yang memberikan stabilitas lokasi bagi para pedagang yang menempatnya sejak Februari 2022. Sebaliknya, Teras Malioboro 2, yang terletak di samping gedung DPRD DIY, hanyalah sebuah struktur semi-permanen yang pada akhirnya dibongkar, bahkan para pedagangnya telah mengalami dua kali pemindahan ke Teras Beskalan dan Ketandan. Perbedaan status antara bangunan permanen dan semi-permanen, ditambah dengan sejarah relokasi yang berulang kali bagi satu kelompok, pada akhirnya menciptakan pengalaman spasial yang sangat berbeda bagi kedua paguyuban tersebut.

Salah satu konsep kunci dalam teori Bourdieu, *hysteresis* terjadi ketika *habitus* yang telah terbentuk dari pengalaman dan kondisi masa lalu tidak lagi selaras dengan kondisi *field* yang telah berubah secara signifikan (Ancelovici 2021). Kondisi ketidakselarasan ini

memunculkan para agen sosial merasa terasing, tidak pada tempatnya, atau salah langkah (*out of their element*), karena disposisi dan strategi lama mereka menjadi tidak efektif dalam konteks yang baru (Grenfell 2014). Bourdieu (2018) sendiri mengilustrasikan hal ini dengan contoh keluarga yang direlokasi ke lingkungan baru; meskipun mereka secara fisik menempati lokasi tersebut, mereka tidak dapat 'menghuninya dengan semestinya' karena tidak memiliki *habitus* yang sesuai. *Hysteresis* sering kali muncul keyakinan yang diterima begitu saja tidak lagi relevan, yang pada akhirnya dapat memicu kebingungan, frustrasi, bahkan penderitaan bagi mereka yang mengalaminya.

Fenomena *hysteresis* yang dialami para pedagang terjadi karena adanya benturan antara *habitus* lama mereka dengan kondisi *field* baru yang dipaksakan melalui relokasi. *Habitus* kolektif para pedagang yang terbentuk selama puluhan tahun di koridor Malioboro lama adalah sebuah sistem praktik adaptif yang kompleks. Ini terwujud dalam pola berdagang yang bersifat linear atau memanjang, yang secara spasial memastikan semua pedagang mendapatkan visibilitas yang relatif merata di hadapan pengunjung. Praktik ini didukung oleh serangkaian kebiasaan lain yang sudah mendarah daging, seperti rutinitas membongkar pasang lapak sesuai batasan ukuran, serta pemanfaatan jejaring sosial seperti jasa pendorong gerobak. Selain itu, *habitus* ini juga mencakup sistem sosial yang kuat, seperti penitipan barang di toko-toko sekitar dan penggunaan gudang bersama untuk menyimpan gerobak dagangan.

Kondisi *field* yang baru di Teras Malioboro secara fundamental menghancurkan logika *habitus* tersebut dengan mengubah pola berdagang dari yang tadinya linear menjadi terpusat dan bertingkat. Perubahan drastis inilah yang membuat seluruh naluri permainan dan strategi bertahan hidup para pedagang menjadi tidak lagi relevan, sehingga memicu *hysteresis*. Banyak lapak kini menjadi tersembunyi karena tidak lagi berada di jalur perlintasan utama, menghancurkan keuntungan dari pola linear. Sistem sosial komunal mereka juga buyar; gudang penyimpanan bersama tidak dapat diakses, dan ikatan sosial seperti makan di warung langganan yang sama pun hilang. Kehancuran sistem dan praktik yang telah mendarah daging inilah yang menjadi bukti nyata dari pengalaman *hysteresis* yang dialami para pedagang, yang menyebabkan frustrasi dan rasa keterasingan di lingkungan baru mereka.

Di atas penderitaan akibat hancurnya *habitus* kolektif yang dialami oleh semua pedagang kaki lima, kelompok Tri Dharma yang ditempatkan di Teras Malioboro 2 menghadapi lapisan masalah tambahan yang memperparah pengalaman *hysteresis* mereka. Keyakinan lama mereka yang menganggap lapak sebagai posisi istimewa dengan akses mudah, kini diguncang oleh *field* baru yang tidak hanya berbeda, tetapi juga penuh ketidakpastian. Relokasi ke bangunan yang bersifat semi-permanen, ditambah dengan ancaman pembongkaran untuk proyek Jogja Planning Gallery (JPG), menciptakan rasa tidak aman dan perasaan terasing yang mendalam. Kondisi ini diperburuk oleh tata letak fisik yang sangat tidak menguntungkan, di mana lapaknya di lantai dua hanya bisa diakses melalui pintu sempit di belakang panggung musik. Sebutan sarkastis 'ruang VIP' yang ia dan 70 pedagang kaki lima lainnya gunakan untuk lokasi mereka menjadi bukti nyata betapa parahnya ketidaksesuaian antara *habitus* mereka yang terbiasa dengan visibilitas tinggi dan realitas baru yang tersembunyi.



Gambar 7. Kondisi Teras Malioboro 2
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar 8. Kondisi Teras Malioboro 1
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

Fenomena *hysteresis* kemudian termanifestasi lebih lanjut dalam pengalaman kelompok Tri Dharma, yang merasakan penurunan pendapatan secara drastis, frustrasi mendalam, dan ketidakcocokan antara disposisi mereka dengan kondisi *field* yang baru. Di lokasi lama mereka yang luas dan terbuka, interaksi dengan pembeli terjadi secara alami dan spontan saat wisatawan melintas, sebuah kondisi yang telah membentuk *habitus* mereka untuk dapat menjangkau pembeli secara langsung. Namun, di Teras Malioboro, pengunjung harus memiliki niat khusus untuk datang dan bahkan perlu 'berkeliling' untuk menemukan lapak mereka. Akibatnya, *habitus* mereka yang selama ini mengandalkan visibilitas dan aksesibilitas tinggi menjadi tidak lagi efektif, yang menimbulkan persepsi bahwa lokasi baru tersebut 'kurang menarik karena memerlukan usaha lebih besar untuk dikunjungi'. Masalah ini diperparah oleh penempatan lapak yang kini terhalang oleh pedagang lain serta tata letak yang padat, yang membuat lapak mereka 'tersembunyi' dan mengurangi kesempatan untuk menarik pembeli.

Berbeda dengan pengalaman Tri Dharma, kelompok Pemalni menghadapi kondisi *field* baru yang jauh lebih stabil dan menguntungkan. Hal ini disebabkan karena mereka mendapatkan lokasi relokasi di Teras Malioboro 1, sebuah bangunan permanen yang secara fisik jauh lebih siap pakai dibandingkan dengan Teras Malioboro 2. Kondisi yang pasti dan

tidak diwarnai oleh relokasi berulang ini membuat tingkat *hysteresis* yang mereka alami jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Tri Dharma. Stabilitas inilah yang membuat mereka cenderung lebih menerima kebijakan relokasi dan tidak ikut dalam aksi protes, sehingga mereka tampak lebih mapan dalam tatanan yang baru. Oleh karena itu, pengalaman spasial yang sangat berbeda inilah yang menjadi akar dari perpecahan sikap antara kedua kelompok pedagang kaki lima tersebut.

Perjuangan kelompok Tri Dharma untuk mempertahankan hak mereka semakin melemah akibat konflik internal yang parah, yang berpusat pada krisis legitimasi ketua mereka, R. Ia dianggap sebagai 'pengkhianat' oleh para anggotanya karena sikapnya yang tidak konsisten, dugaan manipulasi penjualan lapak, serta statusnya sebagai tersangka kasus penggelapan dana, yang menghancurkan kepercayaan kolektif. Krisis ini dieksploitasi secara strategis oleh pemerintah, yang menolak mengakui kepengurusan baru hasil kongres anggota dan justru terus mengakui kepemimpinan R. yang sudah tidak dipercaya; sebuah taktik yang secara efektif melumpuhkan perlawanan Tri Dharma dari dalam dan menggagalkan upaya mereka untuk menentang relokasi.



Gambar 9. Skema Perpindahan dari Teras Malioboro 2 ke Beskalan dan Ketandan
(Sumber: DED Pengembangan Kawasan Pusat UMKM Ex Indra, 2022)

3.4. Perjuangan Simbolik dan Reproduksi Hirarki dalam Ruang Perdagangan Baru

Perpecahan sikap antara kedua kelompok pedagang ini pada akhirnya tidak hanya berakar pada perbedaan pengalaman material dan *hysteresis* semata. Lebih dalam dari itu, relokasi ini memicu sebuah pertarungan simbolik, yaitu sebuah perebutan makna dan legitimasi mengenai siapa yang berhak mendefinisikan “wajah” Malioboro yang sesungguhnya. Dalam pertarungan ini, pemerintah sebagai agen simbolik dominan menggunakan wacana Sumbu Filosofi untuk memaksakan visi tentang Malioboro yang “tertib” dan “berbudaya”. Pemalni mengekor pemerintah dengan beranggapan yang sama. Sementara itu, kelompok Tri Dharma, melawan dengan narasi tandingan yang menegaskan bahwa kehadiran merekalah yang merupakan esensi dari kebudayaan Malioboro itu sendiri.

"Bagi kami, pedagang kaki lima adalah bagian tak terpisahkan dari Malioboro. Kami tidak mengerti mengapa justru kami disingkirkan. Sumbu Filosofi kini hanya soal fisik bangunan. Menurut kami, penataannya keliru, tidak mencerminkan Malioboro yang dulu. Ketika pemerintah mencari pengakuan untuk Sumbu Filosofi, kami malah merasa

terpinggirkan dan sengsara karenanya" (*Interview Bu E, PKL Teras Malioboro Ketandan, Januari 2025*)

Relokasi yang dinilai mendadak dan kurang transparan memperkuat narasi ketidakadilan. Pedagang diminta menandatangani kontrak individual setelah undian lapak yang dianggap tidak adil. Relasi yang semula berbasis paguyuban bergeser menjadi individualistik, dan situasi ini dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi. Para pedagang dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan di lapak baru dengan omzet menurun atau berhenti berjualan dengan risiko sanksi administratif.

"Kami sudah dapat tempat baru, memang, tapi kalau tidak ada pembeli, bagaimana bisa hidup? Kami tak butuh tempat bagus, yang penting ramai pembeli. Rasanya kami dipinggirkan pelan-pelan. Kami tidak tahu persis proyek pemerintah ini, tapi seharusnya ada solusi yang lebih berpihak pada kami. Jangan hanya asal membangun atas nama 'Sumbu Filosofi' tapi pedagangnya ditinggalkan" (*Interview Bu N, PKL Teras Malioboro Beskalan, Januari 2025*)

Di sisi lain, Teras Malioboro menyediakan fasilitas fisik lebih modern seperti lapak berbentuk lemari kabinet, listrik, air, dan layanan kebersihan. Namun, peningkatan fasilitas datang bersamaan dengan pengawasan dan regulasi ketat. Garis batas merah di lantai depan setiap lapak menandai batas maksimal penempatan barang dagangan. Aturan ini memperlihatkan pergeseran dari sistem informal dan fleksibel menuju sistem formal dan terstandardisasi, di mana otonomi pedagang berkurang dan ruang gerak mereka berada di bawah kontrol yang lebih kuat.



Gambar 10. Kondisi Lapak di Teras Malioboro Ketandan
Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2025)

4. SIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari teka-teki sosiologis mengenai alasan pedagang kaki lima Malioboro menunjukkan sikap yang terbelah terhadap kebijakan relokasi meskipun menghadapi tekanan ekonomi serupa. Temuan utama menunjukkan bahwa penjelasan tidak bertumpu pada kalkulasi untung-rugi semata, melainkan pada benturan antara *habitus* yang telah mendarah daging dan kondisi *field* baru yang tidak setara. Perbedaan respons muncul karena kelompok Tri Dharma mengalami *hysteresis* lebih berat akibat kondisi relokasi yang

problematis, sedangkan kelompok Pemalni mengalami *hysteresis* lebih ringan berkat penempatan pada lokasi yang lebih stabil.

Analisis disusun runtut dalam empat bagian: identifikasi *field* Malioboro pra-relokasi yang stabil dan akomodatif; pergeseran mendasar menuju *field* yang lebih restriktif seiring perubahan agenda politik; pembacaan inti persoalan berupa benturan *habitus* lama dengan *field* baru yang memicu *hysteresis* berbeda; serta penegasan bahwa konflik yang terjadi merupakan pertarungan simbolik yang mereproduksi tatanan sosial baru. Secara keseluruhan, relokasi bukan sekadar penataan fisik, melainkan peristiwa sosial-politik yang memengaruhi cara hidup komunitas terdampak. Berlandaskan kerangka Bourdieu, pemahaman dampak kebijakan menuntut perhatian pada interaksi kebijakan dengan *habitus* komunitas; kasus Malioboro menunjukkan bahwa intervensi spasial berpotensi memperkuat ketimpangan dan membentuk hierarki baru apabila dimensi sosial-historis komunitas diabaikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfriyanto, M. B. (2023). *Strategi adaptasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro pasca relokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/222905>
- Ancelovici, M. (2021). Bourdieu in movement: Toward a field theory of contentious politics. *Social Movement Studies*, 20(2), 155–173. <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1637727>
- Antara. (2018, February 13). Pedagang kaki lima Malioboro deklarasi Satgas Selasa Wage. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/685529>
- Atkinson, W. (2021). Fields and individuals: From Bourdieu to Lahire and back again. *European Journal of Social Theory*, 24(2), 195–210. <https://doi.org/10.1177/1368431020923281>
- Bourdieu, P. (2018). Social space and the genesis of appropriated physical space. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42(1), 106–114. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12534>
- Congleton, R. D. (2015). The logic of collective action and beyond. *Public Choice*, 164(3–4), 217–234. <https://doi.org/10.1007/s11127-015-0266-7>
- Detik.com. (2024, July 5). Pedagang Teras Malioboro 2 demo, keluhkan omzet–wacana relokasi jilid 2. *DetikJogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7424446/pedagang-teras-malioboro-2-demo-keluhkan-omzet-wacana-relokasi-jilid-2>
- Garjito, W. (2023). *Analisis penerapan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro dalam rangka mewujudkan kawasan Malioboro sebagai area pejalan kaki* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].
- Grenfell, M. (Ed.). (2014). *Pierre Bourdieu: Key concepts* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315729923>
- Harianjogja.com. (2024, July 17). PKL Teras Malioboro 2 kembali gelar aksi, minta dilibatkan dalam perencanaan relokasi. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/17/510/1181671/pkl-teras-malioboro-2-kembali-gelar-aksi-minta-dilibatkan-dalam-perencanaan-relokasi>
- Heidemann, K. A. (2018). Overcoming uncertainty: Agency, stance, and the rise of collective action in times of crisis. *Sociological Focus*, 51(2), 79–96. <https://doi.org/10.1080/00380237.2017.1370938>
- Jogjapolitan.harianjogja.com. (2019, July 22). Letak lapak diubah jadi ungkur-ungkur, PKL Malioboro protes. *Harian Jogja*.

- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/07/22/510/1007240/letak-lapak-diubah-jadi-ungkur-ungkuran-pkl-malioboro-protes>
- Kompas.id. (2024, October 24). Mengadu ke Komnas HAM, Paguyuban PKL Malioboro minta dilibatkan dalam penataan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/24/rencana-relokasi-paguyuban-pkl-malioboro-desak-dilibatkan-pemda-yogyakarta>
- Millatina, N. (2017). *Eksplorasi ruang jalur pedestrian Jalan Malioboro Yogyakarta* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130330>
- Nur, I. A. (2015). *Semrawut: Sebuah eksplorasi autentisitas Malioboro* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/78344>
- Purwanto, E. (2007). *Rukun kota (Ruang perkotaan berbasis budaya guyub): Poros Tugu Pal Putih sampai dengan Alun-alun Utara Yogyakarta* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/36381>
- Purwanto, E., Djunaedi, A., Wibisono, B. H., & Sudaryono. (2012). Mengelola konflik pemanfaatan ruang berbasis nilai-nilai lokal ruang kota koridor Jalan Malioboro Kota Jogjakarta. *Tata Loka*, 14(3), 171–185. <https://doi.org/10.14710/tataloka.14.3.171-185>
- Relf, E. (1970). An inquiry into the relations between phenomenology and geography. *Canadian Geographies / Géographies Canadiennes*, 14(3), 193–201. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1970.tb01567.x>
- Robbins, D. (2020). *The work of Pierre Bourdieu: Recognizing society*. Routledge.
- Sari, R. E. (2022). *Analisis dampak relokasi pedagang kaki lima terhadap pendapatan dan jumlah pembeli (Studi kasus pedagang kaki lima di kawasan Malioboro)* [Tugas akhir, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/214437>
- Tempo.co. (2022). 4 alasan Sultan HB X tetap merelokasi PKL Malioboro awal tahun ini. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/4-alasan-sultan-hb-x-tetap-merelokasi-pkl-malioboro-awal-tahun-ini-431460>
- Wibisono, B. H. (2001). *Transformation of Jalan Malioboro, Yogyakarta: The morphology and dynamics of a Javanese street* [Disertasi, The University of Melbourne]. <https://minerva-access.unimelb.edu.au/items/8d1a5507-8f53-5c0c-ac6e-f74bc60ac7ff>